

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi telah menunjukkan eksistensinya sebagai pendamping dalam kehidupan manusia dan perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap semua aspek kehidupan manusia termasuk cara berinteraksi satu sama lain. Perkembangan ini membuat manusia dalam melakukan kegiatannya menjadi lebih cepat dan mudah. Dampak positif yang timbul dari kehadiran teknologi mendorong manusia untuk terus menciptakan inovasi-inovasi yang solutif dalam menyelesaikan permasalahan. Tidak terkecuali dalam bidang pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan ke masyarakat.

Pemerintah berperan penting untuk menjaga dan mengatur kehidupan masyarakat agar terhindar dari masalah yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah berperan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam menjalankan perannya, pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi serta mengupayakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan berbagai aspek dalam pemerintahan. Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah yaitu perubahan regulasi dan kebijakan.

Dalam bidang keuangan negara, pemerintah telah melakukan reformasi regulasi. Reformasi ini ditandai dengan terbitnya tiga paket undang-undang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Lahirnya tiga paket undang-undang ini memberi kesempatan kepada pengelola keuangan negara dalam konteks ini adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan keuangan negara sehingga menjadi lebih modern merespon perkembangan teknologi yang massif.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi serta mengembangkan kualitas pelayanan publik, implementasi *Electronic Government* (E-Government) tersebut diharapkan dapat mencapai kualitas dan profesionalitas para pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pengalaman dari dunia internasional, pengelolaan keuangan negara selalu dibantu dengan adanya teknologi informasi (TI) yang disebut dengan *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) (Sudarto, 2019).

Sebagai respon atas dinamisnya perubahan termasuk kemajuan teknologi yang begitu pesat, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku penyelenggara pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara mengembangkan berbagai macam aplikasi. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses penganggaran, pelaksanaan belanja negara,

penatausahaan persediaan dan Barang Milik Negara (BMN), serta pelaporan. Aplikasi itu mencakup aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) DIPA, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis desktop serta memiliki *database* yang terpisah (DJPb, 2019).

Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi, DJPb harus terus melakukan pengembangan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, DJPb menciptakan sebuah aplikasi terpusat yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem aplikasi ini merupakan bagian dari IFMIS yang bersifat wajib untuk digunakan oleh seluruh entitas di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mengelola dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aplikasi SAKTI ini menggantikan kedudukan sistem aplikasi sebelumnya yang masih berbasis *desktop* menjadi Aplikasi SAKTI yang berbasis *web*. Aplikasi *existing* yang berbasis *desktop* bisa digunakan apabila sudah dilakukan proses *install* pada perangkat sedangkan Aplikasi SAKTI dengan basis *web* bisa diakses di perangkat mana pun apabila terhubung dengan koneksi internet. Aplikasi SAKTI menjadi sistem yang menggabungkan seluruh proses pengelolaan APBN. Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang basis datanya terintegrasi, *single entry point*, menerapkan akuntansi berbasis akrual, *web based*, dan sudah *user-friendly* jika dibandingkan dengan aplikasi SAS (DJPb, 2022).

Aplikasi SAKTI hadir untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan

negara yaitu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendaharan Umum Negara (Kuasa BUN). Dengan adanya aplikasi SAKTI yang berbasis *web*, pengajuan dokumen SPM yang awal mulanya secara tatap muka langsung beralih menjadi pengajuan secara *full online* sehingga satuan kerja sebagai *stakeholder* tidak perlu hadir secara langsung ke KPPN. Penerapan Aplikasi SAKTI sudah dimulai pada tahun 2015 dan dilakukan secara bertahap. Setelah dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, Aplikasi SAKTI *full modul* berbasis *web* diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2022 oleh seluruh satuan kerja di Indonesia.

Sebelum implementasi Aplikasi SAKTI maupun sesudahnya, penolakan SPM masih menjadi hal yang belum bisa diatasi secara keseluruhan. Penolakan SPM bisa dilakukan oleh petugas Seksi Pencairan Dana jika terdapat SPM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penolakan SPM tidak bisa dihindari karena terdapat faktor *human error*. Hal tersebut terjadi di KPPN Kendari. KPPN Kendari telah berusaha untuk meminimalisasi penolakan-penolakan tersebut dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada satuan kerja. Namun hingga saat ini masih ditemukan penolakan SPM karena kesalahan input data di SAKTI. Berikut data penolakan SPM di KPPN Kendari.

Tabel I.1 Rekapitulasi Penolakan SPM di KPPN Kendari

	2019	2020	2021	2022	2023
Penolakan Formal	3.293	3.545	3.625	1.550	1.113
Penolakan Substantif	83	155	90	93	77
Jumlah SP2D	70.136	55.797	58.863	62.124	69.129

Sumber: Aplikasi OMSPAN dan Aplikasi SAKTI (diolah)

Tabel I.1 menunjukkan baik sebelum dan sesudah implementasi aplikasi SAKTI penolakan SPM masih menunjukkan angka yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan jumlah SP2D di KPPN Kendari. Perlu penanganan intensif oleh KPPN Kendari untuk meminimalisasi penolakan SPM. Dengan adanya fenomena penolakan SPM yang tidak pernah lepas dari pengelolaan keuangan negara dalam hal ini pengajuan SPM di KPPN Kendari, adanya terobosan dari sisi teknologi yaitu aplikasi SAKTI untuk mempermudah proses pengajuan SPM, serta pembinaan dan pengawasan oleh KPPN Kendari itu sendiri, belum berhasil mengatasi penolakan SPM secara keseluruhan. Perlu diidentifikasi letak permasalahan dan faktor penyebab penolakan SPM. Selain itu, perlu untuk mengetahui kepuasan pengguna aplikasi dalam implementasi aplikasi SAKTI dari sudut pandang satuan kerja maupun petugas KPPN sebagai pengguna layanan terkait penolakan SPM yang terus terjadi. Dari penolakan SPM yang kerap terjadi, perlu diketahui pula upaya apa saja yang telah dilakukan oleh satuan kerja maupun KPPN untuk meminimalisasi penolakan SPM. Hal ini menjadi landasan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Persepsi Pengguna Layanan atas Penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) Sebelum dan Sesudah Implementasi Aplikasi SAKTI Lingkup KPPN Kendari”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana respon pengguna layanan atas implementasi Aplikasi SAKTI?

2. Bagaimana persepsi pengguna layanan terhadap penolakan SPM sebelum dan sesudah implementasi Aplikasi SAKTI?
3. Apa aja upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi penolakan SPM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui Respon Pengguna Layanan atas Implementasi Aplikasi SAKTI;
2. Mengetahui Persepsi Pengguna Layanan terhadap Penolakan SPM Sebelum dan Sesudah Implementasi Aplikasi SAKTI;
3. Mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi penolakan SPM.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini mencakup penolakan SPM baik penolakan manual, formal, dan substantif pada aplikasi SAKTI, respon pengguna layanan atas implementasi aplikasi SAKTI, dan keterkaitan persepsi pengguna layanan dengan penolakan SPM sebelum dan sesudah implementasi Aplikasi SAKTI. Pengguna layanan dibatasi hanya satuan kerja dan petugas Seksi Pencairan Dana pada lingkup kerja KPPN Kendari.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penyusunan karya tulis tugas akhir ini dapat menambah wawasan terkait pelaksanaan belanja negara dan mengetahui pandangan pengguna layanan terhadap penolakan SPM yang terjadi selama proses pelaksanaan belanja negara baik sebelum dan sesudah implementasi Aplikasi SAKTI;

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penulisan karya tulis tugas akhir, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas sudut pandang para pembaca dari pengguna layanan langsung terkait pelaksanaan belanja negara termasuk didalamnya penolakan SPM;

3. Bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi atas implementasi Aplikasi SAKTI dan untuk perbaikan kedepannya sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penolakan SPM yang akan menghambat kecepatan realisasi anggaran belanja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum tentang Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bab ini membahas konsep persepsi, gambaran umum Surat Perintah Membayar (SPM), dan gambaran umum implementasi Aplikasi SAKTI.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, gambaran umum KPPN Kendari, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjabarkan simpulan yang dapat ditarik dari penjelasan bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini mencantumkan saran yang perlu disampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam rangka perbaikan implementasi Aplikasi SAKTI di masa mendatang.